

**TINJAUAN KRITIS DINAMIKA KOMUNIKASI DALAM
PROSES PENGANGGARAN
(Kajian Pada Penyusunan APBD Kota Padang Tahun 2017)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister pada
Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

Oleh:

ISKANDAR
1420869023



**MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

**TINJAUAN KRITIS DINAMIKA KOMUNIKASI DALAM
PROSES PENGANGGARAN
(Kajian Pada Penyusunan APBD Kota Padang Tahun 2017)**

**Oleh:
Iskandar
(BP 1420869023)**

**Pembimbing:
Prof. Dr. Helmi, M.Sc dan Dr. Zainal Arifin, M.Hum**



ABSTRAK

Perkembangan demokrasi di Indonesia mendorong terjadinya komunikasi transaksional antara aktor politik dengan rakyat di ruang publik. Pemerintah atau aktor politik mengelola pesan dengan menojolkan keberhasilan untuk membangun citra positif dimata masyarakat dengan bantuan media. Rakyat jika tidak memiliki daya kritis tentu hanya jadi penonton dan pendengar yang baik dan menentukan pilihan pada pemilu berikutnya. Sementara itu kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat ditentukan dan disepakati oleh aktor politik dengan orientasi nilai dan kepentingan yang belum tentu sama dengan rakyatnya. Dalam tata kelola keuangan negara/daerah, penetapan APBN/D merupakan kebijakan penting karena melalui APBN/D tujuan bernegara diterjemahkan menjadi program kegiatan yang diikuti dengan penyediaan anggaran. Seharusnya kedaulatan rakyat juga meliputi proses penyusunan kebijakan penganggaran ini. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika komunikasi dalam proses penganggaran khususnya dalam penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 dalam konteks demokrasi deliberatif. Lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kembali rakyat Indonesia khususnya rakyat Kota Padang sebagai pemegang kedaulatan atas pemerintahan untuk mengontrol dan mengkritisi APBD tahun 2017 melalui kebersamaan di ruang publik. Karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi interpretatif. Penelitian ini memiliki fokus pada analisa komunikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD Kota Padang tahun 2017 dalam hal ini warga, eksekutif, dan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan warga melalui forum formal atau musrenbang sangat minim diakomodasi dalam APBD. Sedangkan eksekutif dan legislatif mendominasi atau berkuasa untuk mengontrol sebaran dan nilai alokasi pada APBD. Upaya memperoleh kesepakatan ditempuh dengan jalan kompromi melalui forum non formal antara Walikota dan pimpinan fraksi DPRD Kota Padang dengan menghasilkan kesepakatan berupa anggota legislatif dapat mengalokasikan anggaran (dana pokok pikiran) dengan nilai tertentu untuk daerah pemilihan atau konstituennya. Dominasi eksekutif dan legislatif tidak hanya pada forum formal penyusunan APBD, akan tetapi termasuk menguasai ruang publik dalam hal ini media massa lokal berupa program kerja sama antara media dengan pemerintah dan pemberian hibah kepada forum wartawan. Menjadi hal yang wajar apabila media massa lokal kehilangan daya kritisnya kepada pemerintah dan cenderung menjadi bagian dari upaya membangun citra baik pemerintah khususnya aktor politik. Penguasaan ruang publik oleh pemerintah membuat masyarakat tenggelam dalam opini-opini yang telah dibangun pemerintah dan media massa serta penyusunan APBD menjadi area yang eksklusif antara eksekutif dan legislatif.

Kata kunci: *Aspirasi Warga, Musrenbang, Forum Non Formal, Eksekutif, Legislatif, Dana Pokok Pikiran, Ruang Publik, Opini Publik.*

**CRITICAL REVIEW OF COMMUNICATION DYNAMICS
IN BUDGETING PROCESS
(Study On Budgeting Padang City Year 2017)**

**By:
Iskandar
(BP 1420869023)**

**Supervisor:
Prof. Dr. Helmi, M.Sc and Dr. Zainal Arifin, M.Hum**

UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRACT

The development of democracy in Indonesia encourages transactional communication between political actors and the people in the public sphere. Government or political actors manage the message by highlighting the success to build a positive image in the eyes of the community with the help of the media. People, if they do not have critical power, will only be good spectators and listeners and make choices in the next election. Meanwhile, public policies concerning the interests of the people are determined and agreed upon by political actors with value orientations and interests that are not necessarily the same as their people. In the governance of state/regional finances, the determination of APBN/D is an important policy because through APBN/D the purpose of a state is translated into an activity program followed by the provision of budget. The sovereignty of the people should also include the process of formulating this budgeting policy. This scientific thesis aims to describe and analyze the communications procedures in the budgeting process, especially in budgeting Padang city in 2017 in the context of deliberative democracy. This paper uses a qualitative method with interpretative research strategy. This research has focused on communication analysis of the parties involved in the preparation of APBD Kota Padang 2017 in this case citizens, executive, and legislative. The result of the study indicate that the proposal of citizens through formal forums is minimally accomodated in APBD. While the executive and legislative dominates or is in charge of controlling the distribution and value of allocations to the APBD. The effort to get the deal is reached by way compromise through informal forums between The Mayors and leaders of DPRD factions by producing agreements in the form of legislative can allocate budgets (Dana Pokok Pikiran) with certain values for electoral or constitutional areas. Executive and legislative domination not only in the formal forum for the preparation of APBD, but including public sphere in this case the local mass media in the form of cooperation programs between the media and the government and grant to journalist forum. It becomes natural that the local mass media loses its critical power to the government and tends to be part of the effort to build a good image of the government, especially politcal actors. Government control of the public sphere makes the people drowned in opinions that have been built by the government and mass media and than APBD preparation process be an exclusive area between executive and legislative.

Keywords: Aspirations of Citizens, Musrenbang, Informal Forum, Excecutive, Legislative, Dana Pokir, Public Sphere, Public Opinion.